

# **PENERAPAN TUNTUTAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM DELIK KORUPSI PEMERASAN DALAM JABATAN**

**AGUS KURNIAWAN**

## **Abstrak**

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, salah satunya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, namun dalam pelaksanaannya ancaman pidana minimum khusus berbenturan antara Asas Kepastian Hukum dengan Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan Hukum, sedangkan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan juga harus mampu mewujudkan ketertiban hukum, kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma seperti keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tulisan ini menjelaskan Penuntut Umum dapat menerapkan tuntutan pidana di bawah minimum khusus dalam delik korupsi pemerasan dalam jabatan, berdasarkan deskresi penuntutan dan teori kontemporer tujuan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian normatif dengan menganalisis data sekunder. Penelitian ini menjelaskan landasan teori atau kriteria untuk dapat diterapkannya tuntutan pidana di bawah minimum khusus dalam delik korupsi pemerasan dalam jabatan.

**Kata Kunci : Tuntutan Pidana, Minimum Khusus, Tindak Pidana Korupsi**

# **APPLICATION OF CRIMINAL CLAIMS BELOW THE SPECIFIC MINIMUM IN OFFENSES CORRUPTION BLACKMAIL IN OFFICE**

**AGUS KURNIAWAN**

## **Abstract**

In order to achieve a more effective goal of preventing and eradicating corruption, Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption as already stated in the Law of the Republic of Indonesia amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 containing different criminal provisions with previous laws, one of which was to determine a specific minimum criminal threat, but in its implementation a special minimum criminal threat that clashes between the principle of legal certainty with the principle of justice and the principle of benefit Law, while the Public Prosecutor in carrying out the prosecution must also be able to realize certainty, the applicable law, justice and truth based on the law and observing religious norms, politeness, and decency, also must have human values, law, and justice that live in society, as observed Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. This paper explains that the Public Prosecutor can apply criminal charges below the specific minimum in the corruption offense of extortion in office, based on the prosecution's discretion and contemporary theory of sentencing purposes. The type of research used in this paper is a type of normative research which analyzes secondary data. This study explains the theoretical basis or criteria for the application of criminal charges under the special minimum in corruption offenses, extortion in office.

**Keywords : Criminal Charge, Special Minimum, Criminal Act of Corruption**